

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN PEMBAYARAN
UPAH JASA KURIR MOTOR DENGAN MOBIL DALAM
PENGANTARAN BARANG
(Studi di LAZADA Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**ANGGI MARSELY
NPM 1621030401**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

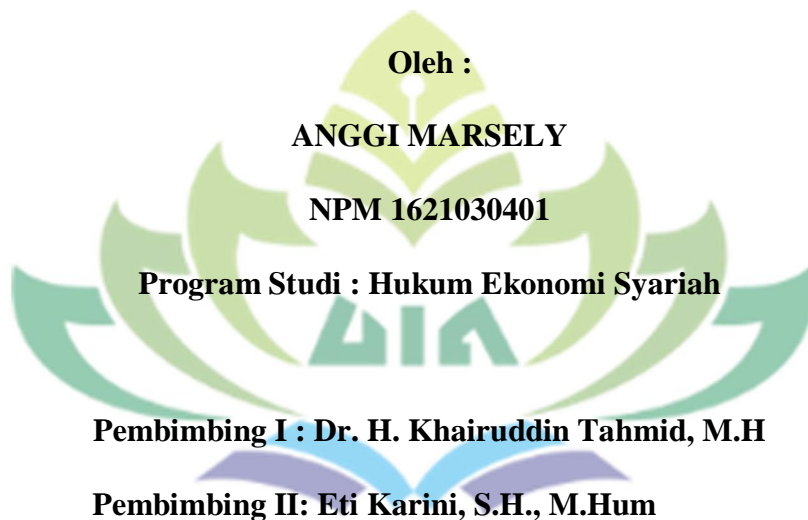


**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN PEMBAYARAN
UPAH JASA KURIR MOTOR DENGAN MOBIL DALAM
PENGANTARAN BARANG
(Studi di LAZADA Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
144^H H/ 2020 M**

ABSTRAK

Perkembangan *Online Shop* atau toko *Online* melalui media internet sudah menjamur di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. *Online shop* sangat berkaitan erat dengan jasa kurir. Lazada membentuk jasa kurir mereka sendiri agar dapat menjamin produk yang mereka kirim sampai di tangan konsumen. Di dalam melakukan proses pengantaran barang antara kurir motor dan mobil memiliki perbedaan yaitu dalam hal pembayaran jasa atau upah. Perbedaan tersebut tersebut terdapat pada gaji pokok dan insentif yang mereka terima. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperhatikan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh, upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Mengapa terdapat perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dengan mobil dalam pengantaran barang di Lazada Bandar Lampung. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dan mobil di Lazada Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dengan mobil di Lazada Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dengan mobil di Lazada Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa terjadinya perbedaan pembayaran upah jasa antara kurir motor dengan mobil karena dalam praktiknya kurir mobil membawa lebih banyak paket otomatis pekerjaan yang dilakukan kurir mobil lebih lama dari kurir motor. Perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dan mobil adalah diperbolehkan dalam Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja. Pembayaran upah jasa di Lazada termasuk kedalam *Ajrun Mitsil* (upah yang sepadan) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja). Dan sesuai dengan *Ijarah 'ain* yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, hal ini dikarenakan ada uang sewa yang diberikan kepada kurir mobil.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Marsely
Npm : 1621030401
Jurusan/Prodi Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

, 10 Juli 2020



Anggi Marsely
NPM 1621030401



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN
PEMBAYARAN UPAH JASA KURIR MOTOR
DENGAN MOBIL DALAM PENGANTARAN
BARANG".**
Nama : Anggi Marsely
NPM : 1621030401
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin M. S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN PEMBAYARAN UPAH JASA KURIR MOTOR DENGAN MOBIL DALAM PENGANTARAN BARANG (Studi di LAZADA Bandar Lampung)** disusun oleh, **ANGGI MARSELY, NPM : 1621030401**, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Jum'at, 07 Agustus 2020.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M. Hum.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khairuddin Tahmid, M.H.
NPM 1621022 1993031002

MOTTO

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

...Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

(Q.S. Al-Baqarah : 233)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Marlizona yang telah membesarkanku, selalu sabar mendidik dan membimbingku, serta senantiasa selalu mendo'akan ku. Yang selalu sabar dan tabah dalam menasehatiku. Terimakasih banyak atas segala pengorbananmu dan jerih payahmu, yang telah menghantarkanku sampai menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Aku sadari pengorbananmu tidak akan terbalas. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kalian orangtuaku.
2. Adikku tercinta Danu Prabowo, yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi serta selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Anggi Marsely, lahir pada tanggal 02 Maret 1998 di Bandar Lampung, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Marlizona. Pendidikan penulis bermula dari:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Hidayatul Islamiyah pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung selesai pada tahun 2010.
3. SMP Negeri 26 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2013.
4. SMA Negeri 7 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2016.
5. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Ucapan terimakasih diucapkan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus sebagai pembimbing I, yang selalu sabar serta memotivasi untuk menjadi pribadi yang berkualitas.

3. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran keteladanan serta berkenan untuk dapat meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khairuddin, M.SI selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI selaku sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulis Skripsi ini.
7. Guru-guru tercinta dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan guru-guru lainnya yang telah mengajarkan ku banyak hal, terimakasih telah memberikan ilmunya.
8. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan do'a serta dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tersayang Gustina Zulfa, Maulida Ismalia, Okta Liana Hendri, Salem Renaldy terimakasih atas segala yang telah diberikan selalu ada dikala membutuhkan. Sahabat sedari SMA Indrie Fitria Wijayanti, teman suka duka.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah khususnya Kelas H.

11. Teman-teman KKN RM 170 di Desa Way Ilahan, Tanggamus terimakasih atas semangatnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas bantuannya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keIslaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung, 10 Juli 2020

Penulis,

Anggi Marsely
1621030401

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikasi Penelitian	6
H. Metode Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Upah Menurut Hukum Islam	
a. Pengertian Upah	12
b. Dasar Hukum Upah	16
c. Rukun dan Syarat Upah	21
d. Macam-macam Upah.....	27
e. Kewajiban <i>mu'ajir</i> dan <i>musta'jir</i>	28
f. Sistem Pembayaran/pengupahan dan Batalnya Upah.....	30
g. Berakhirnya Akad Upah	32
2. Barang dan Jasa	
a. Pengertian Barang dan Jasa	34
b. Pembagian Barang dan Jasa.....	37
c. Jenis-jenis Usaha Jasa.....	41
B. Tinjauan Pustaka.....	52

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Lazada	55
B. Proses Pengiriman Barang	65
C. Sistem Pengupahan Pada Kurir.....	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang di Lazada Bandar Lampung	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi Di Lazada Bandar Lampung)”**, adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.²

Perbedaan adalah selisih atau perselisihan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, Negara, instansi, dan sebagainya. Bisa diartikan juga perbuatan yang memberikan apa-apa yang diperlukan orang lain seperti pelayanan servis³

Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Dahlan, *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 194.

Maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perbedaan upah antara kurir motor dengan mobil, penelitian ini dilakukan pada kurir Lazada Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih serta menentukan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Jasa Kurir Motor dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang” adalah;

1. Alasan Objektif

- a. Belum ada penelitian tentang perbedaan pembayaran jasa upah kurir motor dengan mobil, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.
- b. Perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam bagaimanakah hukum Islam memandang tentang perbedaan pembayaran jasa kurir motor dengan mobil.

2. Alasan subjektif

- a. Literatur yang menunjang penelitian ini dirasa cukup memadai dalam proses penelitian seperti buku, jurnal majalah, peraturan perundang-undangan dan lain-lain sehingga penelitian ini layak dan tepat untuk dilaksanakan.
- b. Ditinjau dari aspek kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ..., h. 762.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia. Dalam perkembangannya jual beli terbagi menjadi dua, yaitu *offline* dan *online*. Baik *offline* maupun *online*, keduanya memiliki kesamaan yaitu dalam hal objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk dan/atau jasa. Perbedaannya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, yang apabila *offline* diserahkan secara langsung bertatap muka, sedangkan *online* tidak demikian. Pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. Komunikasi semata-mata mengandalkan teknologi berupa media sosial.

Perkembangan *Online Shop* atau toko *Online* melalui media internet sudah menjamur di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. *Online shop* sangat berkaitan erat dengan jasa kurir. Memilih jasa kurir yang terpercaya merupakan salah satu keputusan yang penting dalam bisnis *online shop* karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Bahkan salah satu situs *online shop* terpercaya Lazada membentuk jasa kurir mereka sendiri agar dapat menjamin produk yang mereka kirim sampai di tangan konsumen dan terkadang mereka juga memberikan promosi gratis ongkir demi memuaskan konsumennya. DiLazada terdapat dua jasa pengiriman barang, yaitu kurir motor yang biasa disebut dengan *rider* dan kurir mobil yang biasa disebut dengan *driver*.

Di dalam melakukan proses pengantaran barang antara kurir motor dan mobil memiliki perbedaan yaitu dalam hal pembayaran jasa atau upah. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang

telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵ Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan pihak manapun. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut sehingga muncul permasalahan terhadap upah.

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperhatikan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh, upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا ۖ لَا جِيرَ ۖ جِرَ هُ قَبْلَ أَنْ يَحْجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)⁷

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW:

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Hadist ini menjelaskan tentang memberikan upah pekerja atau buruh yaitu hendaknya kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering. Atau dengan kata lain, kita harus segera membayar upahnya bila

⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 187.

⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, cet ke I, 2014), h. 193.

⁷ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyiral Misyriyyah, t.th), h. 18.

kerjanya telah selesai, dan hendaknya kita memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya.

Perbedaan pembayaran jasa pada kurir dalam pengantaran barang antara kurir motor dan mobil terdapat pada gaji pokok dan insentif yang mereka terima. Jika kurir mobil gaji yang mereka terima sudah bersih tidak ada pembagiannya lagi, setiap minggu juga mendapatkan uang tambahan untuk bahan bakar mesin (BBM), dan setiap bulannya mendapatkan uang tambahan untuk biaya sewa mobil. Sedangkan jika kurir motor gaji yang mereka terima masih banyak pembagiannya, yaitu dalam hal bahan bakar mesin (BBM), uang makan, dan untuk perawatan kendaraan.

Insentif diberikan jika ada nya kelebihan paket yang dibawa oleh masing-masing kurir. Setiap kurir motor paket yang harus diantar setiap harinya yaitu sebanyak 50 dan kurir mobil sebanyak 75 paket. Perbedaan insentif yang diterima oleh kurir motor yaitu Rp. 2000/paket, jika mobil Rp. 4000/paket.

Berdasarkan uraian diatas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem perbedaan pembayaran jasa terdapat ketidakadilan antara kurir motor dan mobil. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek peneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang” (Studi di Lazada Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah “Perbedaan Pembayaran Jasa Kurir Motor Dengan Mobil dalam hukum Islam”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang digunakan adalah:

1. Mengapa terjadi perbedaan pembayaran upah jasa antara kurir motor dengan mobil di Lazada Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dan mobil di Lazada Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji tentang perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dengan mobil di Lazada Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pembayaran upah jasa kurir motor dengan mobil di Lazada Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi tentang perbedaan pembayaran upah jasa antara kurir motor dengan mobil.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.⁸ Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁹ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan pada para kurir di Lazada Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki

⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 28.

keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Yang menjadi sumber pertama atau data primer dalam penelitian ini adalah, data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu para kurir di Lazada Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para kurir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan,

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

lembaga, media sebagainya.¹¹ Pada penelitian lapangan ditemukan populasi yang berjumlah 20 kurir motor dan mobil di Lazada Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹² Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).¹³ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada para kurir di Lazada Bandar Lampung.

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2014), h. 81.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h. 120.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 36.

- b. Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁴
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁵
- c. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹⁶

6. Analisis Data

Analisis Data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat membandingkan antara dua komponen yang satu dengan

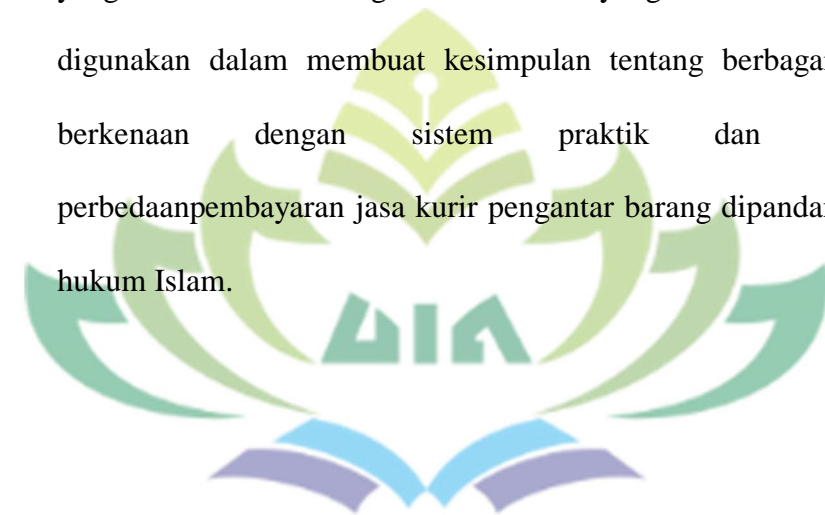
¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ..., h. 126.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 243.

¹⁶*Ibid.*, h. 126.

komponen lainnya (dengan menggunakan angka selisih atau angka rasio). Untuk menganalisis data yang telah terkumpul maka akan menggunakan teknik analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁷

Metode induktif ialah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem praktik dan mekanisme perbedaan pembayaran jasa kurir pengantar barang dipandang menurut hukum Islam.



¹⁷Susiadi, *Metode Penelitian*,..., h. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Upah Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Upah

Upah merupakan sebuah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pembayaran dapat dihitung sebagai jumlah tetap untuk setiap tugas yang terselesaikan.

Upah adalah bagian pengeluaran yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha. Pembayaran dengan upah berbeda dengan kerja bergaji, dimana majikan membayar dengan jumlah tertentu dalam kurun waktu tetap (seperti mingguan dan bulanan) tanpa memerhatikan jam kerja. Pegawai gaji juga menerima uang persen yang dibayar langsung oleh pelanggan dan imbalan kerja yang bentuknya berupa kompensasi bukan uang. Istilah upah sering kali digunakan untuk seluruh bentuk (uang) sebagai kompensasi pegawai.

Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja

professional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, dan manajer. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan lain sebagainya.¹⁸

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *Ijarah*, kata *Al-ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Twadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).¹⁹

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.²⁰

Menurut syara' *ijarah* ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.²¹ Syarat bagi masing-masing *Mukjir* (buruh/yang menyewakan tenaganya) dan *Musakjir* (yang menyewakan tenaga) harus pandai dan tidak ada unsur terpaksa. Kecuali dengan lafadz "*Ma'limah*" (telah diketahui), adalah lafadz "*ju'alah*" (upah perangsang). Lafadz

¹⁸ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 350.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 7.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 101.

²¹ Muhammad Ali, *Fiqih* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 121.

“Masqshudah” (yang dimaksudkan), adalah mengecualikan menyewa bau-bauan karena tujuan baunya.²²

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²³

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Baik digunakan untuk mendapatkan manfaat barang (sewa-menyewa), sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut dengan upah-mengupah.²⁴

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.²⁵

²²*Ibid.*

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 160.

²⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 53.

²⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka), h. 180.

Ada definisi *Al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

- 1) Menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Malikiyah *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- 6) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 114-115.

dalam bahasa Indonesia bahwa sewa-menyewa (menjual manfaat) dan upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).²⁷

b. Dasar Hukum Upah

Kebanyakan ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.

1) Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ اسْتَجِرَّكَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ (اقصص: ٢٦-٢٧)

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku

²⁷Ibid. h. 116.

ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" ²⁸

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: ...”dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang telah bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁰

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cpta Media, 2005), h. 388.

²⁹*Ibid*, h. 46.

³⁰Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

3) Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 disebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾
(النحل : ٩٧)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.³¹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha, perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

4) Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105 disebutkan:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ (التوبة : ١٠٥)

³¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 278.

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang bekerja hanya karena Allah semata dengan aneka amal saleh yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam artian tersebut, ditunjukkan bahwa setiap amal di bumi ganjarannya dari apa yang sudah di perbuat. Maka Allah akan melihat amal perbuatan kalian dan kelak di hari kiamat kalian akan dikembalikan kepada Allah yang melihat segala sesuatu. Dia mengetahui apa saja yang kalian sembunyikan dan apa saja yang kalian perlihatkan. Dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat di dunia dan Dia akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kalian.

5) As-Sunnah

Upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar dan kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخَذَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَيْسَمَّ لَهُ أَجْرَ تَهُ (رَاوَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)³³

³² *Ibid*, h. 162.

³³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet Ke 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 189.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw bersabda “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R Abdurrazaq).

6) Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. ³⁴Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁵

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.³⁶

7) Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha

³⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., h. 11.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h. 165.

ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab I Pasal I angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan:

*“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.*³⁷

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara’ dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah upah (*ijarah*) sebagaimana telah diraikan di atas, maka tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi upah mengupah. Jadi, dapat dikatakan bahwa upah (*ijarah*) dibolehkan dalam hukum Islam dan perundang-undangan apabila sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Rukun dan Syarat Upah

1) Rukun Upah

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa macam³⁸, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan;
- b) Objek akad, yaitu *ma'jur* (asset yang disewakan);
- c) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Rukun *ijarah* ada empat³⁹, yaitu:

- a) *Shighat*, yaitu ijab qabul.
- b) *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
- c) *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).
- d) Upah.

Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan lafaz *ijarah* atau *isti'jar*. Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*muajir dan musta'jir*), *shighat* (ijab dan qabul), *ujrah* dan *manfa'ah*.⁴⁰

- a) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan

³⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 101.

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 197.

⁴⁰ Yadi Yanwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 89.

disebut dengan *mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut dengan *musta'jir*.

b) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut dengan sighat akad (*sighatul- 'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui:

- (1) Ucapan,
- (2) Utusan dan tulisan,
- (3) Isyarat,
- (4) Secara diam-diam,
- (5) Dengan diam-diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan Kabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴¹

c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui benruk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

⁴¹Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 178.

Rukun-rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴²

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- b) *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah.
- c) *Ujrah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.⁴³

2) Syarat Upah

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa menyewa itu sendiri.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 117.

⁴³ *Ibid*, h. 118.

Syarat akad *ijarah*,⁴⁴ sebagai berikut:

- a) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, maka *ijarah*-nya tidak sah.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء : ٢٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- c) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232.

- d) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir.
- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- h) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- i) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.

Apabila syarat *ijarah* diatas telah terpenuhi, maka akad *ijarah* telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus member upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai

kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

d. Macam-macam Upah

Dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:⁴⁵

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Menurut objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

1) *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'ain yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut.⁴⁶ Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa Arab disebut *manfaah*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir*. Dalam perjanjian *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa

⁴⁵ M.I Yusato Dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insni Pers, 2002), h. 67.

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 131.

untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *Ijarah'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.⁴⁷

2) *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'Amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa (*employer*) disebut dengan *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*. Pada *Ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.⁴⁸

Ijarah al-a'mal terbagi menjadi dua, yaitu:

a) *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

e. Kewajiban *Mu'ajir* dan *Musta'jir*

Untuk menjaga agar upah (*ijarah*) tidak menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak maka berikut ini disebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakuakn oleh pelaku *ijarah* yaitu:

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),h. 272.

⁴⁸ *Ibid.*

- 1) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
- 2) Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian mengembalikan sewanya sebagaimana ketika menyewanya. *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mua'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan bagian dari jual beli, maka hukumnya sama dengan jual beli. Dan masing-masing tidak boleh membatalkan akad kecuali persetujuan pihak lain.
- 3) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila pihak yang menyewakan membatasi untuk benda yang disewakan maka tidak berhak untuk menerima upah penuh.⁴⁹

Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

⁴⁹Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 485.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ (الجاثية : ٢٢)

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.⁵⁰

f. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah

1) Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut abi hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam syafi'iyah dan ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mua'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁵¹

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 500.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 121.

- b) Mendapat manfaat. Jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a) Ketika pekerjaan telah selesai
- b) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁵²

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A.Marzuki*(Bandung: Al-Maarif, 1988), h. 26.

2) Batalnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, tidak mendapat upah.

Ulama Hanafiah juga hamper senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁵³

a) Jika benda ada ditangan *ajir*

(1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

(2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.

b) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

g. Berakhirnya Akad Al Ijarah

Pada dasarnya upah (*ijarah*) merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila dihadapi hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.⁵⁴

⁵³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., h. 133-134.

⁵⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 75.

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jir* atau *musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada.⁵⁵ Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari Jumhur Ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.⁵⁶

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

⁵⁵Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 57.

⁵⁶Abdul Rohma Ghazaly dan Ghufon Ihsan dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.⁵⁷

Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya.

2. Barang dan Jasa

a. Pengertian Barang dan Jasa

1) Pengertian Barang

Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi (barang dan jasa), untuk kemudian mendistribusikannya, baik saat ini maupun di

⁵⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 237.

masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.⁵⁸

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa, dengan kata lain kegiatan ekonomi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Kegiatan ekonomi ada 3 macam yaitu, produksi, konsumsi dan distribusi.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia maka diperlukan alat-alat sebagai pemuas kebutuhan. Alat-alat pemuas kebutuhan itu dapat berupa barang/benda dan jasa (*good and serives*).

Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵⁹

Barang juga dapat menjadi alat langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah makanan, minuman dan buku. Sedangkan contoh barang yang akan digunakan untuk menghasilkan barang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah mesin-mesin, peralatan, dan lain-

⁵⁸ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 6.

⁵⁹ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 4.

lain. Barang-barang tersebut merupakan contoh dari barang yang berwujud.⁶⁰

Barang sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar dapat menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Dalam arti luas, barang meliputi objek-objek fisik, jasa, acara, orang, tempat, dan juga organisasi.⁶¹

2) Jasa

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and services*.⁶²

Jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang tidak berwujud, misalnya kebutuhan akan jasa dokter, jasa guru, musik, film, piknik dan sebagainya.⁶³ Jasa tidak dapat digolongkan sebagai suatu barang, karena tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jasa (*services*) adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 266.

⁶² Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*,..., h. 6.

⁶³ Bintari Anwar, *Ringkasan Ekonomi* (Bandung: Ganeca Exact, 2006), h. 15.

pada dasarnya tak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu.⁶⁴

Jasa mempunyai karakteristik unik yang membedakannya dari produk manufaktur. Ada empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa, yaitu : tidak berwujud, berupa ujuk kerja, tidak dapat dipisahkan artinya jasa dihasilkan serta dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dan jasa tidak dapat dijual kembali kepada orang lain.

b. Pembagian Barang dan Jasa

1) Pembagian Barang

Benda/barang yang dipergunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan manusia dibagi dalam bermacam-macam jenis. Hal ini tergantung dari segi apa yang membedakannya.

a) Berdasarkan cara memperolehnya

- (1) Barang bebas/ barang non ekonomi/*free goods* adalah barang yang tidak terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan tenaga atau uang.

Misalnya: udara, sinar matahari, dan air.

- (2) Barang ekonomi/*economic goods* ialah barang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia,

⁶⁴Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*,..., h. 266.

sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan baik tenaga maupun uang.

Misalnya: pakaian, perumahan, mobil.

b) Berdasarkan tujuan penggunaannya⁶⁵:

(1) Barang konsumsi/*consumption goods* ialah alat pemuas kebutuhan yang langsung dapat memuaskan kebutuhan manusia. Barang konsumsi dibagi lagi menjadi:

(a) Barang konsumsi tidak tahan lama, yaitu barang konsumsi yang hanya di pakai sekali. Misalnya makanan.

(b) Barang konsumsi yang tahan lama, yaitu barang konsumsi yang dapat dipakai lebih dari satu kali. Misalnya: pakaian dan perabotan rumah tangga.

(2) Barang produksi/*production goods/capital goods* ialah barang yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Barang produksi dibagi lagi menjadi:

(a) Barang produksi yang hanya sekali pakai. Misalnya bahan mentah, bahan baku.

(b) Barang produksi yang lebih dari satu kali pakai. Misalnya mesin-mesin.

c) Berdasarkan hubungan antara satu benda dengan benda lainnya.

⁶⁵ Bintari Anwar, *Ringkasan Ekonomi*,..., h. 15.

(1) Barang substitusi, yaitu barang/benda yang dapat saling menggantikan pemakaiannya. Misalnya beras dengan jagung.

(2) Barang komplementer, yaitu barang/benda yang baru mempunyai nilai guna apabila digabungkan pemakaiannya. Misalnya jarum dengan benang.

d) Berdasarkan jaminannya⁶⁶

(1) Barang bergerak, yaitu barang yang dipergunakan untuk memperoleh kredit jangka pendek.

Misalnya: perhiasan untuk memperoleh pinjaman pegadaian.

(2) Barang tidak bergerak, yaitu barang yang dipergunakan untuk memperoleh kredit jangka panjang.

Misalnya: tanah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank.

2) Pembagian Jasa

Jasa bisa diklasifikasikan berdasarkan beraneka ragam kriteria. Menurut Lovelock, jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Sifat Tindakan Jasa

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat

⁶⁶ *Ibid*, h. 16.

tindakan jasa (*tangible actions and intangible actions*). Sedangkan sumbu horizontalnya adalah penerima jasa (manusia dan benda).

b) Berdasarkan Hubungan dengan Pelanggan

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa dan pelanggannya (status keanggotaan dan hubungan temporer), sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat penyampaian jasa (penyampaian secara berkesinambungan/kontinyu dan penyampaian diskret).

c) Berdasarkan Tingkat *Customization* dan Kemampuan mempertahankan standar konstan dalam penyampaian jasa

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat *customization* karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan individual (tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam mempertahankan standar yang konstan (tinggi dan rendah).

d) Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak (permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan permintaan puncak

biasanya melampaui penawaran), sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu .

e) Berdasarkan metode penyampaian jasa

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan dan perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa; perusahaan jasa mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan perusahaan jasa melakukan transaksi melalui surat atau media elektronik), sedangkan sumbu horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa.⁶⁷

Ditinjau dari sumber pendapatannya, ada tiga macam jasa. Pertama, jasa yang sumber dana utamanya berasal dari pelanggan, misalnya perusahaan penerbangan. Kedua, jasa yang sumber dananya terutama berasal dari donasi, seperti yayasan sosial. Dan ketiga, jasa yang sumber dana utamanya didapat dari pajak, misalnya instansi pemerintah.⁶⁸

c. Jenis-jenis Usaha Jasa

Pada dasarnya, jasa merupakan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang bersifat tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik.⁶⁹

⁶⁷ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 84.

⁶⁸ *Ibid*, h. 86.

⁶⁹ David Wijaya, *Pemasaran Jasa Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 2.

Bisnis usaha jasa yaitu badan usaha yang usahanya memberikan atau menyewakan jasa kepada orang atau badan lain.⁷⁰ Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang menghasilkan produk-produk yang tidak berwujud seperti jasa pendidikan, perbankan, kesehatan, jasa pariwisata, jasa angkutan(transportasi) dan sebagainya.⁷¹

1) Jasa Pariwisata

Wisata adalah kegiatan bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, wisata juga bisa diartikan sebagai piknik. Usaha atau jasa pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata secara menyeluruh dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, tetapi tidak diibaratkan sebagai pabrik yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, serta ada produknya.

Jenis-jenis Usaha Jasa Pariwisata, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a) Jasa Biro Perjalanan Wisata

Merupakan perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang termasuk kelengkapan perjalanannya, dari suatu tempat ke

⁷⁰Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 42.

⁷¹Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Bpfe, 2003), h. 4.

tempat lain, baik di dalam negeri, dari bertujuan untuk pariwisata.

b) Jasa Konsultan Pariwisata

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang pariwisata.

c) Jasa Informasi Pariwisata

Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata yang mana ruang lingkup kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁷²

2) Jasa Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷³

Jenis-jenis Jasa Perbankan yaitu sebagai berikut:

a) Jasa Pengiriman Uang (Transfer)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota,

⁷²Sukmadi, *Inovasi & Kewirausahaan* (Bandung: Humaniora, 2016), h. 131.

⁷³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), h. 53.

luar kota atau ke luar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan.⁷⁴

b) Jasa Kliring (*Clearing*)

Kliring adalah penagihan warkat bank yang berasal dari dalam kota melalui kliring. Pengertian lainnya kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinir oleh lembaga Bank Indonesia setiap hari kerja.⁷⁵

c) Jasa Inkaso (*Collection*)

Inkaso adalah warkat-warkat bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contoh jasa inkaso adalah apabila kita memperoleh selebar cek yang diterbitkan oleh Bank BNI di kota Surabaya, maka cek tersebut dapat dicairkan di Bank yang berada di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini bank yang di Jakartalah yang menagihkannya ke bank di BNI Surabaya dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri.⁷⁶

d) Jasa Penyimpanan Dokumen (*Safe Deposit Box*)

Safe Deposit Box merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak

⁷⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 130.

⁷⁵ *Ibid*, h. 131.

⁷⁶ *Ibid*, h. 133.

dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.⁷⁷

e) Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)

Bank card merupakan “Uang plastik” yang dikeluarkan oleh bank. Kegunaannya adalah sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, hotel, restoran dan lain-lain. Dengan kartu ini juga dapat diuangkan berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*).⁷⁸

f) Jasa Valuta Asing (*Bank Notes*)

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan, hal ini tergantung dari peraturan devisa di Negara asal bank notes diterbitkan.⁷⁹

g) Jasa Cek Wisata (*Travellers Chaque*)

Jasa *Travellers Chaque* adalah cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh wisatawan. *Travellers*

⁷⁷*Ibid*, h. 134.

⁷⁸*Ibid*, h. 137.

⁷⁹*Ibid*, h. 139.

Chaque diterbitkan dalam nominal tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

h) Jasa Letter Of Credit (L/C)

Jasa Letter of credit (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegiatan *letterof credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangannya.⁸⁰

i) Jasa Bank Garansi

Jasa Bank Garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.⁸¹

⁸⁰*Ibid*, h. 143.

⁸¹*Ibid*, h. 147.

j) Jasa-jasa di Pasar Modal

Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain sebagai berikut:

- (1) Penjamin emisi (*underwriter*), yaitu bank sebagai penjamin terjualnya efek (saham dan obligasi) sampai batas waktu tertentu.
- (2) Wali amanat (*trustee*), yaitu bank menjadi amanat dalam emisi obligasi.
- (3) Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*), yaitu bank perantara jual beli efek.
- (4) Pedagang efek (*dealer*), yaitu bank berfungsi sebagai pedagang atau perantara jual beli efek.
- (5) Perusahaan pengelola dana (*investment company*), yaitu bank sebagai pengelola dana nasabah di bursa efek.

k) Jasa Penyetoran Dana

Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain:

- (1) Pembayaran listrik;
- (2) Pembayaran telepon;
- (3) Pembayaran uang kuliah;
- (4) Pembayaran rekening air;

(5) Dan setoran lainnya.

Jasa ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam membayar kewajibannya cukup pada satu tempat.

1) Jasa Pembayaran Dana

Jasa Pembayaran Dana dalam hal ini bank dapat pula memberikan pelayanan berupa jasa pembayaran seperti antara lain:⁸²

- (1) Membayar gaji;
- (2) Membayar pensiun;
- (3) Membayar bonus;
- (4) Membayar hadiah;
- (5) Membayar dividen;
- (6) Dan pembayaran lainnya.

3) Jasa Kesehatan

Pada umumnya produk jasa kesehatan yang dihadirkan hampir sama karena keberadaan pemilik produk jasa kesehatan sudah dikelompokkan dalam beberapa tipe pelayanan yaitu ada produk jasa kesehatan pelayanan umum dan ada tipe produk jasa pelayanan khusus. Untuk produk jasa kesehatan umum sudah dikenal secara umum seperti produk jasa kesehatan di masing-masing tipe rumah sakit dan jasa kesehatan khusus serta produk jasa

⁸² *Ibid*, h. 151.

kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, dan produk jasa kesehatan yang lain.⁸³

Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan meliputi:⁸⁴

- a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
- b) Jasa dokter hewan.
- c) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi.
- d) Jasa kebidanan.

4) Jasa pendidikan

Jasa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan dan dikonsumsi secara serempak pada waktu yang sama. Jika peserta didik membeli jasa maka akan berhadapan langsung dengan penyedia jasa pendidikan.

Jenis-jenis di bidang pendidikan meliputi:⁸⁵

- a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan

⁸³Manahati Zebua, *Pemasaran Produk Jasa Kesehatan* (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 65.

⁸⁴ Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 13.

⁸⁵ Jaja Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Usaha Jasa* (Depok: Jaja zakaria, 2018), h. 225.

- b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.

5) Jasa Transportasi

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu Negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi.

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sector-sektor lain (sector pertanian, sector perindustrian, sector konstruksi, sector keuangan, sector pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan dan lainnya) untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sector tersebut.⁸⁶

Jenis-jenis transportasi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu transportasi darat, laut dan udara.

a) Transportasi Darat

Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang.

⁸⁶ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), h. 1.

b) Transportasi Laut

Angkutan laut pada dasarnya merupakan bagian dari angkutan darat (jalan raya), maka dari itu angkutan laut diharapkan memenuhi criteria yang mendekati sifat-sifat angkutan darat. Transportasi laut sebagai salah satu subsistem transportasi harus mampu menggerakkan pembangunan daerah dalam rangka pemantapan wawasan nusantara. Jenis kendaraan transportasi laut yaitu, kapal, feri dan sampan.⁸⁷

c) Transportasi Udara

Menurut Salim (1993) angkutan udara mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa angkutan udara serta meningkatkan pelayanan, peningkatan armada atau pesawat udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa dan pengembangan jasa-jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi.

Pesawat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

Pesawat penumpang, sarana transportasi udara ini merupakan pesawat yang diperuntukkan memuat penumpang beserta barang bawaannya, biasanya pesawat penumpang memiliki rute atau jarak tempuh dekat (dalam negeri/domestik) maupun jauh (luar negeri/internasional).

⁸⁷*Ibid*, h. 42.

Pesawat barang atau kargo, pesawat barang atau kargo merupakan jenis pesawat berukuran besar dan memiliki daya muat yang besar, pesawat jenis ini diperuntukkan hanya untuk mengangkut barang dengan jarak tempuh jauh biasanya melayani rute penerbangan internasional.

Pesawat militer, pesawat jenis ini merupakan jenis pesawat khusus, tidak diperuntukkan sebagai pesawat penumpang maupun pesawat kargo.⁸⁸

6) Usaha Jasa Titip atau Jastip

Biasanya pelaku jasa titip ini adalah seseorang yang tinggal di luar kota atau negeri yang menawarkan barang ciri khas Negara atau kota setempat. Cara kerjanya adalah dengan masuk ke toko Fashion atau makanan lalu mereka akan memotret barang-barang dan kemudian akan di unggah ke media sosial.

B. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas peneliti maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan perbedaan pembayaran upah jasa terhadap kurir yang diangkat oleh peneliti. Peneliti

⁸⁸*Ibid*, h. 67.

menemukan beberapa penelitian terkait perbedaan pembayaran upah jasa, sebagai berikut:

Pertama yaitu yang ditulis oleh Ismawati pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi kasus pada Driver Go Jek Online di Bandar Lampung)”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana perbedaan ini difokuskan kepada cara pembayaran suatu penggunaan jasa ojek online, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terjadinya perbedaan pembayaran dengan uang tunai dan gopay yaitu untuk memudahkan konsumen untuk memilih pembayaran pada jasa ojek online.

Kedua yaitu yang ditulis oleh Siti Nur Kholifah pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah antara Laki-laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana penelitian ini memfokuskan pada perbedaan pemberian upah antara laki-laki dan perempuan. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena dalam Al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga yaitu yang ditulis oleh Budi Santoso pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh *Thresher* (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini menggunakan tinjauan ekonomi Islam, yang mana penelitian ini fokus pada perbedaan pemberian upah pada

buruh *Thresher*. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam ekonomi Islam belum memenuhi prinsip keadilan, karena masih terdapat unsure yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan dari ketiga penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berfokus pada praktik pembayaran upah. Sedangkan pada penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang” berfokus pada perbedaan pembayaran upah jasa antara sesama kurir atau pekerjaan. Jadi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet Ke 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyiral Misyriyyah,t,th.

Mustofa, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1, Semarang: CV Toha Putra, 1984.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdul Rohma Ghazaly dan Ghufroon Ihsan dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ali, Muhammad, *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.

Andria Permata Veithzal dan Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Anoraga, Pandji, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Anwar, Bintari, *Ringkasan Ekonomi*, Bandung: Ganeca Exact, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Dahlan, *Epistimologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Fatimah, Siti, *Pengantar Transportasi*, Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Firdaus, Muhammad, *Manajemen Agribisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Gary Armstrong dan Philip Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Gitosudarmo, Indriyo, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Bpfe, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Irwansyah Lubis dan Gustian Djuanda, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Ja'far, AK, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Permatanet, 2014.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka), h. 180.
- Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- MK Widjajakusuma dan M.I Yusato, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insni Pers, 2002.

- Muhammad, AK, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A.Marzuki*, Bandung: Al-Maarif, 1988.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*13, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Saefulloh, Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Sangadji, EM, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sukmadi, *Inovasi & Kewirausahaan*, Bandung: Humaniora, 2016.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Permatanet, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),h. 272.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tjiptono, Fandy, *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Wijaya, David, *Pemasaran Jasa Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Yanwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Zakaria, Jaja, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Usaha Jasa*, Depok: Jaja zakaria, 2018.

Zebua, Manahati, *Pemasaran Produk Jasa Kesehatan*, Jakarta: Deepublish, 2018.

C. Wawancara

Al Hadi (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Arif (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Bambang (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Bonggo (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Deny (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Hendra Agus (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Ido (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Imam (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Irwansyah (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada 17 Maret 2020.

Jhon Robet (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Lanang (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Perdi (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Purba Sandi (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada 17 Maret 2020.

Resa (Kurir Mobil), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Rifki Dwi Setiawan (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Riko (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Riyan (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Rori (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada 17 Maret 2020.

Tri (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

Yasin (Kurir Motor), Wawancara dengan Penulis, Lazada, 17 Maret 2020.

D. Sumber *On-line*

Lazada.co.id, “Sejarah Lazada” (On-line), tersedia di:
<https://www.lazada.co.id/about/> (20 Januari 2020).

Lazada.co.id, “Metode Pembayaran” (On-line), tersedia di
<https://www.lazada.co.id/helpcenter/metode-pembayaran-apa-saja-yang-tersedia-dan-bagaimana-cara-bayarnya.html> (20 Januari 2020).

Lazada.co.id, “Pengembalian Dana” (On-line), tersedia di
<https://www.lazada.co.id/helpcenter/bagaimana-saya-melacak-status-pengembalian-dana-saya-5992.html> (20 Januari 2020).